

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN BERAS DI
KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI DI DINAS
PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON)**

¹ Marcelino Giovanni Paulus Tolosang; ² Arwanto Harimas Ginting
NPP. 31.0897 ¹

¹ *Asdaf Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: ¹ marcelino.giovanni20@gmail.com ; ² arwantoharimasginting@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (GAP) The availability of rice is very important because rice is a basic need for most Indonesian people, especially in Tomohon City. Population growth is increasing, so the demand for rice is increasing, but the availability of agricultural land is decreasing due to land being converted into housing and public facilities. **Purpose:** The aim of this research is to describe and analyze the government's role in maintaining the availability of rice in Tomohon City, North Sulawesi Province. **Method:** This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique uses data triangulation techniques, namely observation, interviews, documentation with 13 informants with data analysis techniques according to Miles and Huberman. **Result:** The results of this research reveal the role of the government as a regulator in forming regulations which become a permanent legal basis for maintaining the availability of rice, the role of the dynamist is to encourage community participation to actively participate in maintaining the availability of rice through several programs such as cheap food programs, food villages and increasing the capacity of farmers and the role of facilitator The government facilitates the farming community, such as providing modern facilities and infrastructure such as tractors and rice shedding machines and fertilizer to farmers, apart from that, the role of agricultural extension workers is to provide direct intervention to farmers to improve the quality and production of rice. **Conclusion:** The government's role in maintaining the availability of rice in Tomohon City is running well. This can be seen from the availability of rice in Tomohon City which is sufficient for consumption by the people in Tomohon City. **Keywords:** *Food, Rice Availability, Government Role*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Ketersediaan beras sangatlah penting karena beras merupakan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia Khususnya di Kota Tomohon. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka permintaan akan beras semakin meningkat, tetapi ketersediaan lahan pertanian semakin menurun karena alihfungsi lahan menjadi pemukiman dan fasilitas umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik triangulasi data, yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dengan 13

informan dengan Teknik analisis data menurut Miles and Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah sebagai regulator membentuk peraturan yang menjadi landasan hukum tetap dalam menjaga ketersediaan beras, peran dinamisator adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam menjaga ketersediaan beras melalui beberapa program seperti gelar pangan murah, kampung pangan dan peningkatan kapasitas petani dan peran fasilitator pemerintah memfasilitasi masyarakat petani seperti memberikan sarana dan prasarana modern seperti tractor dan mesin rontok padi serta pupuk kepada petani, selain itu peran para penyuluh pertanian untuk memberikan intervensi secara langsung kepada pada petani untuk meningkatkan kualitas dan produksi padi.

Kesimpulan: Peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon yang mencukupi untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Kota Tomohon.

Kata kunci: *Pangan, Ketersediaan Beras, Peran Pemerintah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pangan menjadi salah satu jenis kebutuhan primer yang tidak bisa terpisahkan dari hajat hidup orang banyak (Dewi & Ginting, 2012) Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi, hal ini merupakan bagian dari hak individu itu sendiri untuk menenuhi kebutuhannya. Selain itu, pemenuhan akan pangan yang tercukupi adalah komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan serta sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di masyarakat. Tirtosudiro dalam bulog mendefinisikan ketahanan pangan nasional sebagai kemampuan negara untuk menghasilkan jumlah bahan pangan yang memadai bagi konsumen dengan harga yang terjangkau (Dirhamsyah, 2016).

Pangan dan ketahanan pangan merupakan sektor yang serius yang berhubungan langsung dengan pembangunan nasional sehingga memberi dampak baik bagi pertumbuhan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan terampil. Ini merupakan bentuk dari implikasi dari ketersediaan jenis pangan yang berkualitas, sangat beragam, harga stabil, dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat (Azhari & Hadiutomo, 2014). Seperti halnya di Provinsi Sulawesi Utara, daerah agraris yang memiliki potensi terhadap sektor pertanian. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang optimal. Sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Sulawesi Utara, harus menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan pangan masyarakat serta untuk menunjang pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah justru memunculkan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Ini dapat terlihat pada masalah pedesaan dan pada sektor pertanian. Hal ini dapat menggambarkan bahwa saat ini, Provinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses transisi pembangunan infrastruktur seperti jalan, pabrik, perkantoran, pemukiman, dan sebagainya. Secara sadar pemerintah melakukan defisit lahan garapan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan lokal. Luas panen padi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 adalah sebanyak 62.020,20 hektar. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61.827,86 hektar. Tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 29.182,52 hektar dan ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 58.195,56 hektar. Secara keseluruhan luas panen padi di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami penyusutan. Dari tahun 2019-2022 lahan pertanian padi menyusut dari 62.020,20 ha menjadi 58.195,56 ha. Alihfungsi lahan

terus terjadi di Provinsi Sulawesi Utara ini menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara berjalan dengan sangat pesat. Tentu hal ini merupakan sebuah tren positif terhadap pembangunan secara infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Akan tetapi disatu sisi menjadi tanda awas terhadap sektor pertanian, terlebih terhadap ketersediaan lahan untuk penunjang pangan lokal beras di Provinsi Sulawesi Utara.

Ketersediaan beras di Provinsi Sulawesi Utara sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Sulawesi Utara. Kebutuhan masyarakat akan pangan beras tidak bisa ditahan dan sampai saat ini menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan ketersediaannya. Produksi beras di Sulawesi Utara tahun 2019 adalah sebesar 155.287,73 ton. Tahun 2020 mengalami penurunan produksi menjadi 139.133,28 ton. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan produksi dan hanya mencapai 130.865,75 ton. Tahun 2022 produksi padi di Sulawesi Utara meningkat menjadi 142.438,39 ton.

Dapat dilihat bahwa penurunan jumlah produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara terjadi dari tahun 2019-2022. Produksi beras di tahun 2019 berjumlah 155.287,73 ton menyusut menjadi 142.438, 39 ton di tahun 2022. Walaupun angka produksi ditahun 2022 naik dari pada angka produksi beras di tahun sebelumnya yaitu 2021 sebesar 130.86,75 ton akan tetapi dari kurun waktu 4 tahun terakhir, produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan.

Kota Tomohon merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon, yang merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan memiliki tanah yang subur. Sumber daya yang melimpah ini didapatkan karena letak Kota Tomohon yang berada didataran tinggi, dan berada disekitar pegunungan vulkanik yang membuat tanah disekitarnya menjadi subur, dan sangat cocok untuk ditanami tanaman pangan. Makanan pokok masyarakat Kota Tomohon adalah beras, dan ditambah juga ubi kayu dan jenis ubi yang lain serta jagung atau beras jagung. Produksi padi Kota Tomohon tahun 2019 adalah sebesar 1.100,77 ton. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.095,11 ton. Tahun 2021 produksi padi mengalami peningkatan yakni sebanyak 1.151,05 ton. Tahun 2022 produksi padi Kota Tomohon meningkat signifikan menjadi 1.649,82 ton. Dapat dilihat bahwa jumlah produksi beras dikota Tomohon mengalami perkembangan yang stabil. Akan tetapi dilihat bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 terjadi penurunan produksi yaitu pada tahun 2020, dan kemudian naik pada tahun 2021 dengan kenaikan yang tidak terlalu signifikan seperti pada tahun 2022. Perkembangan jumlah produkai beras di Kota Tomohon, tidak lepas dari laju pertumbuhan penduduk Kota Tomohon. Laju pertumbuhan penduduk kota tomohon dapat dikatakan stabil. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk kota tomohon sebesar 0,30% dengan jumlah penduduk sebanyak 99.682 jiwa. Kemudian naik menjadi 100.587 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,91 %. Ditahun 2021 jumlah penduduk kota tomohon bertambah menjadi 100.853 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,35%. Kemudian pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk kota tomohon berada pada angka 101.151 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,32%.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang akan berpengaruh pada ketersediaan pangan di Kota Tomohon. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah memiliki hubungan dengan meningkatnya alihfungsi lahan (Syarifuddin et al., 2013). Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin bertambah lahan untuk dijadikan pemukiman, sehingga akan berimbas pada lahan-lahan pertanian yang menjadi sumber pangan. Lahan pertanian sawah juga tidak akan luput dari peralihan lahan pertanian, menjadi lahan pemukiman (Kurniasari & Ariastita, 2014). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan akan stok beras akan meningkat. Alih fungsi lahan pertanian yang memiliki laju yang tinggi dapat mengancam ketahanan pangan penduduk (Prasada & Rosa, 2018). Alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lahan yang lain adalah masalah yang sangat

kompleks apabila dilihat dari derajat pertumbuhan alih fungsi lahan, faktor topografi, kaitan dengan kehidupan sosial dan budaya, penambahan populasi, tingkat kesejahteraan petani, irigasi, perluasan kota, *political will* dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Kaputra, 2013). Hal ini karena konsumsi masyarakat terhadap beras akan ikut meningkat seiring bertumbuhnya penduduk. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya kerawanan pangan. Kerawanan pangan erat kaitannya dengan isu kemiskinan.

Korelasi sikap yang fluktuatif berdasarkan data statistik diatas sangat memberikan gambaran bahwa pangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, Aridhayandi,(2019) mengungkapkan bahwa harga pangan, jumlah penduduk, transformasi lahan pertanian ke non-pertanian berimplikasi buruk. Ini terjadi karena konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan pangan dari masa ke masa mengalami peningkatan. Lebih lanjut krisis pangan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi karena stok bahan pangan terbatas, terutama pangan beras. Sehingga diperlukannya peran pemerintah untuk menciptakan ketersediaan pangan yang cukup untuk menjaga ketahanan pangan secara utuh (Prabowo, 2010).

Pemerintah daerah perlu untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan melalui kontrol dan pengendalian pangan (Rumawas et al., 2021). Hal ini sejalan dengan (Ndraha, 2011) bahwa peran pemerintah adalah sebuah bentuk pemenuhan kebutuhan yang diperintah akan layanan kepada setiap orang pada saat diperlukan. Stabilitas harga produk, sistem logistik pangan dan transparansi serta difersifikasi pangan merupakan bentuk-bentuk upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan. Menurut Gross (2000) dan Weingarter (2004) dalam Gunawan (2017) ketahanan pangan terdiri dari empat subsistem atau aspek utama salah satunya adalah ketersediaan pangan. Untuk memfasilitasi hal itu, pemerintah membentuk sebuah instansi resmi sebagai perpanjangan peran pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab khusus untuk menjaga ketersediaan pangan. Dinas pangan Kota Tomohon selaku lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan pangan yang ada di Kota Tomohon, harus mampu untuk mengatasi masalah permasalahan ketersediaan pangan, agar dapat terwujud ketahanan pangan yang mampu mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah dan nasional.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Adapun penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah artikel jurnal yang berjudul “PERAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PANGANDARAN” oleh Nita Sonia dkk, tahun 2020 bahwa belum optimalnya peran dinas sebagai *regulatory role*, *enabling role*, dan sebagai *direct provision of good and service*. Ketiga peran tersebut ternyata belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan terdapat daerah yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang rendah dan dapat memicu kerawanan pangan di daerah yang memiliki ketahanan pangan yang rendah. Artikel jurnal dengan judul “PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI” yang ditulis oleh Riyaya Hajja Nugrohowati dkk, pada tahun 2022 dengan berfokus di Kabupaten Ngawi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Kabupaten Ngawi mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani dari Kementerian Pertanian dengan meraih peringkat tiga prestasi tingkat kabupaten dalam kategori produksi padi. Keberhasilan yang mendapatkan penghargaan ini tidak lepas dari campur tangan dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hasil yang didapatkan bahwa, keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari bagaimana dinas ketahanan pangan dan pertanian melaksanakan perannya berdasarkan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi nomor 20 Tahun 2022. akan tetapi dalam menjaga dan meningkatkan produksi padi, dinas ketahanan pangan

dan pertanian harus terus menjaga eksistensi perannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. skripsi yang disusun oleh Nobila Saumy Arghniya tahun 2021 dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN MASYARAKAT KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)“ dalam skripsi ini dijelaskan bahwa produksi padi di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 269.470 ditahun 2019, menjadi 230.875 di tahun 2020. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya kerentanan terhadap kerawanan pangan di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, salah satunya di kecamatan Kota Jantho. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah daerah yang dilakukakn terhadap kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), modal awal dan pengadaan gabah. Dalam penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa salah satu gampong Kota Jantho masih belum menunjukkan perubahan kearah keluarnya dari status kerawanan pangan. Selain itu masyarakat Kota Jantho hanya bisa memproduksi padi setahun sekali.

Jurnal *Governance* yang ditulis oleh Virginia Rumawas dkk, pada tahun 2021 dengan Judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI DINAS KETAHANAN PANGAN MINAHASA SELATAN)“ Penelitian yang dilakukan disalah satu Kabupaten di Sulawesi Utara ini didapatkan hasil bahwa, dalam rangka mewujudkan ketahan pangan terdapat 2 aspek yaitu operasi langsung dan aspek pengendalian langsung dibawah pengawasan langsung oleh dinas ketahanan pangan Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu pemerintah juga melakukan impor beras dari daerah lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Minahasa Selatan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Peneliti juga memberikan saran perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan yakni melakukan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.

Jurnal penelitian yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM INOVASI GERAKAN SERENTAK PEMANFAATAN PEKARANGAN ORGANIK (GERTAK PETANI) UNUTK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI KELURAHAN LAPAJUNG KABUPATEN SOPPENG“ yang ditulis oleh Yustika Rama dkk, pada tahun 2021. Penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan inovasi pemerintah gerakan serentak pemanfaatan pekarangan organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi gerakan serentak pemanfaatan pekarangan organik (gertak petani) pada Keuntungan relatif yang dimaksud disini adalah manfaat yang dirasakan oleh anggota kelompok/masyarakat dengan Adanya Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) ini. Kesesuaian adalah adanya pemahaman dan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam pelaksanaan inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani). Kerumitan disini adalah Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) yang masih lumayan baru dan berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Kemungkinan dicoba adalah dalam hal ini Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) telah terlaksana sampai sekarang. Kemudahan diamati adalah dalam pelaksanaan Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) ini berharap kedepannya dan seterusnya dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik kepada masyarakat. Skripsi yang berjudul “PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DI KOTA BATAM“ yang ditulis

oleh Donita Ega Stefani Sirait pada tahun 2023. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kota Batam sedang mengalami kekurangan pangan akibat dari melemahnya pengelolaan pangan, sehingga seringkali harga pangan menjadi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan pertanian masih kurang efektif. Keaktifan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian hanya berfokus pada kolaborasi terbatas dengan dolog/bulog dan tidak terjadi dengan pihak swasta, yang mengakibatkan kebutuhan pangan seringkali bermasalah. Selain itu, lumbung pangan yang tersedia berjumlah 2 (dua) dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sehingga sangat sulit bagi petani dan pedagang untuk menjual hasil panen kepada masyarakat luas. Peneliti juga memberikan saran kepada pemerintah yaitu harus dilakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan yang efektif untuk dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang meningkat oleh masyarakat dengan antisipasi ketahanan pangan daerah.

Jurnal Kebijakan Publik dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *URBAN FARMING*” dari Dzulhijjah Dwi Yanti dan Ertien Rining Nawangsari. Penelitian ini dilakukan di kampung Songo Surabaya Jawa Timur. Permasalahan tersebut harusnya menjadi nafas dari pola kebijakan oleh pemerintah daerah dan perkotaan untuk membangkitkan pertanian pada kawasan kota (*Urban Agriculture*), salah satu solusi alternatif yang mudah penerapannya adalah urban farming. Ketersediaan lahan pertanian pada saat ini semakin menurun oleh pertumbuhan pembangunan gedung perkotaan, sehingga berakibat bagi berkurangnya lahan pertanian untuk bercocok tanam dan kemungkinan juga berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya telah menjalankan peran dengan cukup baik dalam Pengembangan Urban Farming di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Penelitian dari Jurnal Relasi Publik dengan Judul “*URBAN FARMING DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PERKOTAAN*” yang ditulis oleh I Dewa Gede Putra Sedana dan Ni Luh Putu ening Permini tahun 2023. Dimana penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar, Bali. penelitian ini berguna untuk mengetahui analisis dalam melihat pelaksanaan urban farming di Kota Denpasar. Penelitian ini membahas tentang perbedaan peran urban farming antara program pemerintah kota dan organisasi independen, dilihat dari sumberdaya juga melalui kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar melalui pendekatan kualitatif. Kegagalan kebijakan disebabkan kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi melalui urban farming yang dibentuk secara top down. Sedangkan, kegagalan pasar terjadi pada urban farming di Kota Bandung dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar. Hal ini merupakan salah satu motif dominan munculnya urban farming bottom up oleh kelompok organisasi independen. Sementara, sumber pemodal urban farming adalah berupa sarana pendukung sarana tanam, instalasi hidroponik, dan pembuatan greenhouse, namun pemodal urban farming yang dibentuk organisasi independen bersumber dari kontribusi anggota masyarakat koperasi dan dana bank. Aspek penting yang dibutuhkan oleh kelompok organisasi independen yaitu mengefisienkan biaya operasional dengan mengetahui cara menggunakan kembali barang bekas menjadibarang-barang yang produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mardilis dan Imron Rosyadi dengan judul Artikel “MODEL REVITALISASI FUNGSI DAN PERAN LUMBUNG PANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN” Secara umum, berdasarkan hasil di lapangan kinerja lumbung pangan desa (LPD) yang ada di desa-desa tertinggal sangat rendah, sehingga tidak membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. LPD di desa-desa tertinggal perlu diperluas fungsi dan perannya, sebagaimana yang direkomendasikan penelitian ini dalam bentuk model “Model Revitalisasi Fungsi dan Peran Lumbung Pangan Desa”. Hal ini sesuai amanat UU No 6 tentang Desa, dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. BUMD tersebut bisa didirikan di desa-desa tertinggal dalam bentuk usaha Baitul Mall Tamwil Desa

(BMT-D). Penelitian yang dilakukan oleh Komang Suarsana dengan Judul Artikel “KETAHANAN PANGAN BERBASIS ADAT (TANTANGAN PENANGANAN COVID-19 DI BALI)” hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam konteks ketahanan pangan, posisi dan peran desa adat di Bali sangat strategis. Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19, karena mendayagunakan potensi desa adat. Namun, belum berhasil mengatasi persoalan kebutuhan pangan dan fluktuasi harga pangan masyarakat secara optimal. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Kondisi itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terlebih dengan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Covid-19 berbasis desa adat di Bali. Secara spesifik, upaya menjaga dan memperkuat ketahanan pangan berbasis desa adat di Bali dapat ditempuh melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang, baik pada saat masih berlangsungnya pandemic maupun pasca-pandemi Covid-19.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan teori untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Peran menurut Prof Ryass Rasid, yaitu teori peran pemerintah yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, dimensi regulator, dimensi dinamisator, dan dimensi fasilitator. Teori ini dipilih karena cocok untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah. Yang dimana dalam penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan teori peran dari Prof Ryass Rasid dalam (Labolo,2010:32) yang merupakan teori peran pemerintah. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis milik Miles and Huberman yang sedikit digunakan oleh penelitian sebelumnya. Selain itu lokus penelitian juga berbeda dari para penelitian terdahulu. Selain itu kondisi penelitian yang dilakukan adalah pasca pandemi Covid-19 dimana keadaan proses pemulihan seluruh lini kehidupan pemerintah dan masyarakat dibangun kembali pasca dilanda pandemi tersebut. Sehingga membuat penelitian ini menarik dan memiliki kebaruan ilmu.

1.5. Tujuan

1. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pangan Kota Tomohon dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja faktor yang menjadi hambatan Dinas Pangan dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami berbagai fenomena berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain, secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan dalam kata-kata dan Bahasa, pada konteks khusus secara alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,2018). Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah penelitian partisipatif yang memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong,2017). Penulis menggunakan metode dan pendekatan ini dengan maksud yaitu yang pertama, Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian

kepada objek, sekelompok manusia, kondisi, keadaan, suatu pemikiran yang terjadi dimasa sekarang. Adapun tujuan dari penulisan metode ini adalah untuk menganalisis dan mendeksripsikan fenomena atau peristiwa yang ada dan hubungannya, yang disusun secara sistematis, dan akurat (Nazir,2013). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian kepada objek, sekelompok manusia, kondisi, keadaan, suatu pemikiran yang terjadi dimasa sekarang. Adapun tujuan dari penulisan metode ini adalah untuk menganalisis dan mendeksripsikan fenomena atau peristiwa yang ada dan hubungannya, yang disusun secara sistematis, dan akurat. Penulis menggunakan teori Peran menurut Prof Ryass Rasid dalam (Labolo 2010:32) yaitu, peran pemerintah sebagai Regulator, Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator. Sedangkan untuk teknik penentuan informan, penulis menggunakan Teknik *Porposive sampling*, Teknik ini digunakan untuk menentukan informan berjumlah 4 orang, dan dan untuk 9 orang informan lainnya peneliti menggunakan Teknik *Snowball* dengan batasan 5 orang berasal dari perwakilan setiap kecamatan, dan 4 orang perwakilan dari 2 kelurahan. Yaitu 1 kelurahan dengan produksi tertinggi, dan 1 yang terendah. Sumber data adalah subjek darimana seorang peneliti dapat memperoleh data (Arikunto, 2006). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik triangulasi data yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi. Dan untuk Teknik analisis data menggunakan Teknik miles and Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah bagian yang sangat penting. Menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010:32) pemerintah sebagai penggerak dan pelaksana di tengah masyarakat harus menyiapkan arah dan kebijakan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Dalam penelitian ini peran pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, berperan sebagai regulator. Dalam penentuan kebijakan dan peraturan serta arah dan program yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemui di lapangan menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, berpatokan pada Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan ini, terdapat tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, yaitu terdapat dalam pasal 135-140. Sedangkan dalam keterkaitan dengan tanggung jawab tugas dan fungsi untuk ketersediaan beras dalam hal ini berkaitan dengan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan terdapat pada pasal 137 pada huruf (a), (b), dan (c) yaitu berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Pasal dengan jelas memperlihatkan bagaimana peran pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon.

Sesuai dengan wawancara dan pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian, ketersediaan beras juga merupakan bagian dari bidang distribusi dan cadangan pangan. Hal ini karena keterkaitan dengan ketersediaan beras melalui pasokan dan distribusi yang ada di Kota Tomohon. Dengan jelas diatur dalam pasal 138 huruf (a), (b), (h), (i), (y), dan (z). Pada Pasal 138 Huruf (a), (b), (h), (i), (y), dan (z) ini, peran pemerintah dalam hal distribusi dan cadangan pangan diatur. Berdasarkan pasal ini pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan, kebijakan, dan melakukan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan. Hal ini karena berdasarkan hasil

penelitian di lapangan ketersediaan beras di Kota Tomohon sangat bergantung pada pasokan yang masuk di Kota Tomohon, dalam hal ini melalui para pedagang yang ada di pasar Kota Tomohon baik pasar tradisional maupun pasar modern. Begitu juga dengan cadangan beras pemerintah daerah, berdasarkan penelitian dilapangan, peraturan terkait dengan cadangan beras pemerintah daerah, saat ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon (DPRD). Peraturan terkait dengan cadangan beras pemerintah daerah ini perlu dibuat dalam rangka memberikan landasan hukum kepada pemerintah Kota Tomohon, terkait dengan pengelolaan cadangan beras pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan tentang cadangan beras pemerintah daerah, pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan terakit dengan cadangan beras pemerintah daerah ini akan tertata dengan baik, serta sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan. Sehingga saat ini Dinas Pangan Daerah melalui bidang distribusi dan cadangan pangan terus mengawal penerbitan produk hukum ini, agar supaya apabila cadangan beras pemerintah daerah ini dibutuhkan, dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan. Karena selama ini cadangan beras pemerintah daerah tidak pernah tersentuh atau digunakan karena dasar hukum terkait dengan penggunaannya juga belum ada.

Ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon juga dipengaruhi oleh program yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, yaitu kegiatan Gelar Pangan Murah dan Kegiatan Kampung Pangan. Melalui program kampung pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah dan bekerja sama dengan PKK di setiap kelurahan yang ada di Kota Tomohon, masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bahan pangan yang ditanam seperti sayur, Cabai, umbi-umbian dan sebagainya. Dalam kegiatan ini juga diharapkan bahwa masyarakat membiasakan diri dengan menanam dan mengkonsumsi bahan pangan pengganti, atau yang biasa disebut diversifikasi pangan, dimana masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan pengganti pangan utama. Seperti menanam umbi-umbian untuk menggantikan ketergantungan masyarakat terhadap beras, agar supaya masyarakat tidak terlalu ketergantungan terhadap beras yang saat ini menjadi bahan pangan utama bagi masyarakat. Selain itu masyarakat juga bisa mengganti dengan menggunakan beras jagung untuk menggantikan dengan beras padi yang di konsumsi masyarakat saat ini.

Pemerintah Kota Tomohon berharap agar ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan yang didapatkan melalui jual beli di dalam pasar dapat beralih pada pangan yang di hasilkan dari kebun dan pertanian mandiri masyarakat melalui kampung pangan. Selain itu pemerintah juga berharap dapat menekan inflasi akibat kenaikan bahan pangan pokok salah satunya adalah beras. Program gelar pangan murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon adalah salah satu bentuk program yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan beras. Dalam kegiatan ini masyarakat bisa membeli beras dengan harga yang jauh dibawah harga pasar yang sudah di subsidi oleh pemerintah, dan membeli dalam jumlah yang banyak untuk menjadikan stok pangan mandiri bagi masyarakat. Sehingga ketersediaan beras bisa terjaga melalui stok pangan mandiri masyarakat yang ada di keluarga masing-masing. Selain beras, dalam kegiatan gelar pangan ini juga menyediakan bahan pangan lainnya, seperti Cabai, dan Merica, serta bahan pangan lainnya.

Program yang dibuat dan dilaksanakan ini merupakan hasil dari peran pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini program yang dilakukan memiliki tujuan untuk membantu menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Program yang dilatarbelakangi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan mereka ini dianggap mampu untuk menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon.

B. Dinamisator

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010:32) pemerintah sebagai dinamisator adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai dinamisator melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon adalah memberikan dorongan masyarakat terkhususnya para petani padi untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas mereka dalam menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon.

Peran petani sangat penting dalam menjaga ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Walaupun produksi yang dihasilkan belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Tomohon, namun inilah yang menjadi alasan pemerintah Kota Tomohon untuk perlu melakukan peningkatan kapasitas para petani padi yang ada di Kota Tomohon. Ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon tidak selamanya akan terjamin baik. Pasokan yang masuk di Kota Tomohon menjadi andalan Kota Tomohon sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kota Tomohon. Ketergantungan akan pasokan ini harus segera diatasi dengan meningkatkan kemampuan para petani untuk menghasilkan produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tomohon terhadap beras.

Tabel 3.1 Data Ketersediaan dan Pasokan Pangan Utama Tahun 2023

No	Bulan	Ketersediaan (Ton)				
		Data Produksi		Pasokan		CBPK
		Beras	Jagung	Beras	Jagung	Beras
1.	Januari	182	2.247	972	17,5	27,3173
2.	Februari	80	2.401	1.289,06	74,18	27,3173
3.	Maret	0	1.729	927,7	33,36	27,3173
4.	April	0	2.786	785,5	15,5	27,3173
5.	Mei	1.176	4.735,5	2.765,3	136,8	27,3173
6.	Juni	948	3.773	1.108,5	34,5	27,3173
7.	Juli	596	4.221	1.057	19	27,3173
8.	Agustus	0	3.780	1.050,83	19,5	27,3173
9.	September	0	5.153,4	737,63	17,51	27,3173
10.	Oktober	72	5.153,4	737,63	17,51	27,3173
11.	November	1.670	581,7	801	16,5	27,3173

12.	Desember	758	700	971	18,5	38,83
	Jumlah	5.482	37.1154,6	13.275,56	418,85	38,83

Sumber : Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, 2023

Oleh karena itu, pemerintah Kota Tomohon terus melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas para petani sebagai produsen beras. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas para petani sangat penting. Ditengah alihfungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk yang memaksa lahan pertanian para petani mengalami penurunan, peningkatan kapasitas petani sangat perlu dilakukan agar dalam keterbatasan lahan pertanian, para petani tetap dapat menghasilkan produksi padi yang baik, dan berkualitas.

Peningkatan kualitas dan kemampuan petani ini juga diharapkan akan mampu untuk memberikan keuntungan kepada Kota Tomohon, agar kedepannya tidak akan bergantung lagi kepada pasokan beras yang masuk ke Kota Tomohon. Petani yang ada di Kota Tomohon di persiapkan untuk mampu memproduksi beras dalam negeri melalui hasil pertanian mereka sendiri. Sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan beras yang ada di Kota Tomohon.

Faktor penghambat para petani yaitu alihfungsi lahan merupakan hal yang harus ditertibkan oleh pemerintah. Penertiban yang dimaksud berkaitan dengan perna pemerintah sebagai regulator yaitu menetapkan peraturan tentang alihfungsi lahan. Tujuannya agar lahan pertanian yang ada di Kota Tomohon tidak semakin menyusut, dan diharapkan akan semakin bertambah untuk memenuhi kebutuhan pertanian dalam hal ini beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat Kota Tomohon.

Dalam penelitian ini, pemerintah Kota Tomohon memiliki cadangan beras pemerintah daerah seperti pada table 3.1 yang diperuntukkan apabila kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana non alam, bencana social dan keadaan darurat, yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah daerah apabila stok beras dipasar maupun stok mandiri masyarakat sudah habis. Akan tetapi dalam cadangan beras pemerintah ini tidak pernah digunakan oleh pemerintah Kota Tomohon sejak cadangan beras pemerintah ini ada yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena kondisi Kota Tomohon tidak pernah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah. Dalam kurun waktu dari tahun 2014-2023 tidak pernah kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana non alam, bencana social dan keadaan darurat, yang harus membuat pemerintah mengeluarkan cadangan beras pemerintah, sehingga cadangan beras pemerintah Kota Tomohon sampai saat ini masih tetap tersimpan di gudang penyimpanan bulog. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk menjadi tempat penitipan atau penyimpanan cadangan beras pemerintah dengan perjanjian kerjasama sejak tahun 2019-2023. Bahkan ditahun 2024, pemerintah Kota Tomohon akan kembali bekerja sama dengan Bulog untuk menjadi tempat penyimpanan cadangan beras pemerintah daerah Kota Tomohon. Data Ketersediaan Tahun 2023 mencapai 575,763% merupakan data Beras dan Jagung. Data beras berasal dari data distribusi, pasokan dan cadangan beras pemerintah Kota Tomohon sedangkan data jagung berasal dari data produksi dan data pasokan. Capaian data ketersediaan pangan melewati target yang diharapkan karena Kota Tomohon merupakan Kota transit yang memiliki pasar tradisional. Capaian tahun 2023 sebesar 612.51% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 660.6%. Capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, namun tetap berada pada hasil sangat memuaskan karena melebihi target yang diharapkan yang artinya ketersediaan pangan dapat mencukupi kebutuhan konsumsi Masyarakat Kota Tomohon. Dan rata-rata capaian realisasi sampai dengan Tahun 2023 mencapai 457,03%.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon terus mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Pemerintah Kota Tomohon telah menjalankan peran sebagai dinamisator dengan baik. Hal ini karena pemerintah terus bergerak mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketersediaan beras dan menciptakan kestabilan ditengah masyarakat. Ketersediaan beras merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai bahan kebutuhan pokok.

C. Fasilitator

Menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010:32) pemerintah memiliki 3 peran didalam masyarakat, salah satunya adalah peran sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010:32) adalah menciptakan kondisi kondusif dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu menciptakan serta memberikan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang aman, dan nyaman serta dapat menciptakan ketertiban.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon menjalankan peran sebagai fasilitator dalam rangka untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon. Pemerintah memberikan fasilitas berupa barang dan jasa untuk ketersediaan beras yang di Kota Tomohon khususnya kepada para petani padi yang ada di Kota Tomohon.

Dalam penelitian ini, pemerintah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada para petani padi yang ada di Kota Tomohon. Sarana dan Prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon berupa mesin traktor yang digunakan untuk membajak sawah. Dengan adanya mesin traktor ini membuat pekerjaan para petani dalam proses pembajakan sawah untuk persiapan menanam padi menjadi lebih singkat. Dari hasil wawancara dengan petani, disebutkan bahwa dengan alat pertanian modern ini, waktu pengerjaan yang dibutuhkan bisa sampai 2-3 hari saja, dibandingkan dengan menggunakan sarana tradisional menggunakan sapi sebagai alat bantu untuk membajak sawah yang memakan waktu lebih lama yaitu 4-5 hari.

Selain bantuan berupa traktor, pemerintah juga memberikan bantuan berupa mesin rontok padi yang digunakan oleh petani pada saat masa panen. Dulunya para petani yang ada di Kota Tomohon menggunakan alat bantu berupa batu yang diletakkan di tanah kemudian secara bergantian para petani memukulkan batang padi ke batu tersebut untuk memisahkan batang padi dengan biji padi. Dalam proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, hal ini tergantung pada jumlah panen dan jumlah pekerja yang ada. Semakin banyak jumlah panen yang dikumpulkan akan semakin lama juga proses untuk memisahkan batang padi dan bijinya. Ditambah lagi apabila para pekerja dengan jumlah yang sedikit, akan semakin membuat proses memisahkan batang padi dengan biji padi akan semakin lama. Sehingga proses panen akan memakan beberapa hari. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan alat atau mesin rontok yang menggunakan tenaga bensin ini, akan semakin mempermudah pekerjaan para petani disaat musim panen. Dengan teknologi yang lebih modern ini, waktu panen yang tadinya bisa berlangsung beberapa hari, akan lebih efektif dan efisien dengan satu hari saja. Sehingga tidak akan menghambat pada proses selanjutnya yaitu proses penjemuran padi sebelum akhirnya masuk ke penggilingan padi untuk menghasilkan beras.

Teknologi yang lebih modern diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon untuk mempermudah para petani. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa pupuk kepada para petani. Bantuan berupa pupuk ini diberikan untuk membantu para petani memaksimalkan hasil pertanian mereka. Disisi lain, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini juga memberikan dampak yang positif kepada para petani, dimana selain untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka, tetapi juga membantu para petani dalam hal sisi finansial. Karena dengan adanya bantuan pemerintah ini, para petani tidak lagi susah payah untuk mencari pupuk dan membeli pupuk. Sehingga membantu mengurangi pengeluaran

secara finansial kepada para petani.

Selain bantuan fisik berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon, sebagai bentuk peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah Kota Tomohon juga memberikan penyuluhan, pelatihan, monitoring, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian Kota Tomohon. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Peningkatan kapasitas petani juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon. Petani padi yang ada di Kota Tomohon terus dibekali dengan bimbingan dan pengarahan dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mereka, agar menciptakan kualitas dan kuantitas hasil panen yang baik. Dalam upaya meningkatkan kapasitas petani padi, pemerintah memiliki para penyuluh pertanian yang bertugas untuk terjun langsung kepada para masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani. Penyuluh pertanian yang merupakan ujung tombak pemerintah kepada para petani menjadi bagian yang penting dalam peningkatan kapasitas petani. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani terus dilakukan oleh para penyuluh pertanian agar menciptakan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang baik.

Para penyuluh pertanian melakukan penyuluhan, pendampingan, dan monitoring kepada para petani secara berkala. Dalam kurun waktu 1 bulan, mereka dapat melakukan 2 kali intervensi kepada para petani dengan turun langsung ke para petani untuk melihat bagaimana proses pertanian. Selain itu jumlah para penyuluh pertanian yang ada di Kota Tomohon yang saat ini berjumlah 65 orang diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian yang ada di Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon telah memberikan berbagai fasilitas dan menjadi fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petani dan untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon. Komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon dengan menjalankan peran sebagai fasilitator sangatlah penting. Tanpa adanya fasilitator ketersediaan akan alat pertanian dan pengolahan yang modern untuk menunjang produksi beras dan menjaga ketersediaan beras menuju ketahanan pangan tidak akan pernah terwujud dan tidak akan pernah tercapai.

Faktor Penghambat Dinas Pangan Daerah Dalam Menjaga Ketersediaan Beras Di Kota Tomohon

A. Regulator

Dalam menjalankan peran sebagai regulator, pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon. Belum adanya aturan atau peraturan tentang Cadangan Beras Pemerintah meliputi, pengadaan pengelolaan, maupun penyaluran cadangan beras pemerintah apabila terjadi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana non alam, dan bencana social ataupun keadaan darurat.

B. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator memiliki beberapa factor yang bisa menghambat yaitu, belum tersedianya lumbung pangan atau gudang beras milik pemerintah Kota Tomohon. Hal ini tentu saja akan menjadi factor penghambat, karena sampai saat ini pemerintah masih meminta bantuan kepada pihak ketiga dalam hal ini bekerja sama untuk menjadi gudang penyimpanan pangan terutama beras. Tentu akan sangat berpengaruh apabila disaat dibutuhkan, jarak antara gudang penyimpanan pihak ketiga berada jauh dari Kota Tomohon.

Selain itu, faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dalam menjaga ketersediaan beras. Hal ini berakar pada pola pikir dan budaya masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Budaya di Kota Tomohon dalam hal mengkonsumsi beras sangat tidak baik. Dalam sekali makan bisa mnghabiskan porsi makan untuk 3x dalam sehari, sehingga mengakibatkan pemborosan pangan dalam hal ini nasi.

Apabila hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan bahwa ketersediaan beras di Kota Tomohon akan mengalami penurunan akibat pola makan dan konsumsi yang tidak seimbang dan tidak sehat.

Ketersediaan beras di Kota Tomohon dipengaruhi oleh pasar yang ada di Kota Tomohon. Faktor penghambat yang dialami adalah ketidakterbukaannya pada pedagang dalam memberikan data pasokan beras di Kota Tomohon. Hal ini berkaitan dengan data ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Dengan tidak adanya kerjasama yang baik dengan pedagang dalam memberikan data terkait dengan pasokan dan distribusi beras di pasar Kota Tomohon, akan membuat Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon dalam mendata pasokan dan distribusi beras di Kota Tomohon. Dimana selama ini ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon sebagian besar hanya bergantung pada pasokan yang masuk di pasar yang ada di Kota Tomohon.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor yang menghambat ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Walaupun hasil produksi petani di Kota Tomohon belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Tomohon, akan tetapi alih fungsi lahan yang terus terjadi ini akan menyebabkan produksi menjadi menurun, mengakibatkan masyarakat yang tadinya bisa menghasilkan berasnya sendiri tanpa harus membeli kepada para pedagang, akan menjadi pembeli, akibat dari alih fungsi lahan yang terjadi. Penyusutan lahan akibat alih fungsi lahan ini akan sangat berdampak pada masyarakat, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani dan pemilik lahan. Para petani akan kehilangan lahannya dan mata pencaharian mereka, dan para pemilik lahan akan mengalami kekurangan akibat lahan sawah yang bisa menghasilkan beras untuk mereka, tidak lagi dapat digunakan akibat dialih fungsikan menjadi perumahan, jalan, atau fasilitas lainnya.

C. Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah menyiapkan dan memberikan sarana dan fasilitas yang memadai kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu untuk dipergunakan dan membawa dampak yang diharapkan. Salah satu faktor yang menghambat dalam menjaga ketersediaan beras adalah fasilitas atau sarana prasarana yang diberikan masih belum mencukupi untuk aktivitas petani padi. Jumlah fasilitas yang diberikan terutama traktor dan alat rontok padi masih sangat sedikit.

Kondisi seperti ini yang menyebabkan masyarakat, terutama para petani untuk meminjam kepada mereka yang punya. Hal ini tentu akan memberikan dampak pada proses tanam padi. Waktu yang diperlukan untuk menunggu giliran untuk menggunakan traktor pembajak sawah tentu akan berpengaruh, selain itu harga bahan bakar yang dipakai oleh traktor sangatlah mahal. Hal ini mengingat para petani bukanlah kalangan masyarakat menengah keatas, sehingga kebutuhan dalam membajak sawah menggunakan traktor akan membebankan para petani. Selain itu dalam masa panen, penggunaan mesin rontok untuk mempermudah petani dalam memisahkan batang padi dan biji padi juga sangat berpengaruh. Sama halnya dengan penggunaan traktor, para petani yang belum memiliki mesin rontok padi harus menunggu giliran untuk memakainya. Waktu yang diperlukan untuk menunggu giliran akan mengakibatkan kerugian kepada para petani dari segi lama waktu mereka panen, semakin lama panen, maka hama seperti burung dan tikus untuk menyerang tanaman padi akan semakin terbuka, apabila burung atau tikus memakan padi, maka petani yang seharusnya bisa mendapatkan hasil 20-30 karung, namun akibat keterlambatan panen, hanya akan mendapatkan 15-20 karung akibat diserang hama burung dan tikus. Selain itu juga kebutuhan bahan bakarnya sangat besar juga.

Sistem Irigasi yang buruk juga mempengaruhi pada proses sampai panen padi. Sistem Irigasi yang buruk dapat membuat kerugian kepada para petani karena tidak tercukupinya air untuk system pengairan di sawah. Sehingga perlu diperbaiki oleh pemerintah sebagai peran pemerintah dalam memberikan fasilitas yang memadai kepada para petani padi untuk meningkatkan produksi hasil panen

mereka. Akibat system irigasi yang buruk, para petani padi akhirnya merubah lahan mereka menjadi lahan untuk menanam jagung yang tidak memerlukan terlalu banyak air seperti padi. Hal inilah akan mempengaruhi penurunan produksifitas hasil panen para petani.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan bahwa peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon berjalan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon yang melakukan dan melaksanakan segala bentuk urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar yang berkaitan dengan pangan. Dalam penelitian ini sebagai bentuk peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah melakukan dan memprogramkan beberapa kegiatan untuk mendukung ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Program yang dilakukan diantaranya adalah Kegiatan Gelar Pangan Murah, dan Kegiatan Kampung Pangan yang kedua kegiatan ini dilakukan diseluruh kelurahan yang ada di Kota Tomohon. Selain itu, Pemerintah daerah kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah juga melakukan pengusulan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon terkait dengan Peraturan tentang Cadangan Beras Pemerintah Kota yang sampai penelitian ini dilakukan masih dalam proses pembahasan di DPRD Kota Tomohon. dan diharapkan segera rampung agar penyaluran cadangan beras pemerintah kota dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Kemudian sebagai dinamisator, pemerintah memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas para petani padi yang ada di Kota Tomohon. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas baik secara kualitas maupun kuantitas para petani padi. Diharapkan bahwa dari kegiatan peningkatan kapasitas petani padi ini produksi padi yang ada di Kota Tomohon dapat semakin berkembang dan semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kota Tomohon. Peningkatan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada para petani dan memberikan pelatihan keterampilan kepada para petani terkait dengan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas para petani dan produksi beras.

Peran pemerintah yang ketiga adalah peran pemerintah sebagai fasilitator dimana, pemerintah sebagai penyedia fasilitas dan saran prasarana untuk menunjang ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Fasilitas dan Saran prasarana yang diberikan seperti pembuatan jalan hotmix diseluruh akses menuju lahan pertanian sawah, kemudian pemberian alat pertanian seperti traktor dan alat rontok padi untuk membantu para petani meningkatkan hasil kerja pertanian mereka. Selain itu juga diberikan bantuan seperti pupuk dan bibit padi kepada para petani untuk di tanam dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi yaitu beras.

3.2. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon sangat cukup, bahkan melimpah. Hal ini dikarenakan secara teori ketersediaan beras terdiri dari tiga cakupan yaitu, produksi dalam negeri, stok atau pasokan, dan cadangan beras pemerintah kota serta bantuan dari instansi atau Lembaga lain. Di Kota Tomohon sendiri produksi dalam negeri masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan beras masyarakat Kota Tomohon. Sehingga ketersediaan beras di Kota Tomohon, sangat bergantung pada pasokan dan stok beras yang di pasar atau para pedagang pasar. Stok dan pasokan beras yang ada di Kota Tomohon sangatlah melimpah, dan ini dikendalikan oleh para pedagang. Sedangkan pemerintah melalui Dinas Pangan hanya sebagai pencatat pasokan dan stok yang masuk. Sehingga dari data yang didapatkan menunjukkan ketersediaan beras di Kota Tomohon tercukupi bahkan melimpah.

IV. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon melalui Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon terbagi menjadi tiga, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan program kebijakan, landasan hukum yang tetap bagi Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pangan terlebih khusus menjaga ketersediaan beras. Peran sebagai dinamisator, dimana pemerintah melalui Dinas Pangan Daerah menggelar kegiatan pangan murah bagi masyarakat, peningkatan kapasitas para petani padi, menjaga ketersediaan pasokan beras dan produksi beras di Kota Tomohon, bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam hal ini bulog untuk menyimpan cadangan beras pemerintah kota, menyiapkan cadangan beras pemerintah kota. Peran pemerintah yang ketiga yaitu sebagai fasilitator, dimana pemerintah memberikan fasilitas berupa bantuan alat pertanian modern untuk menunjang kegiatan pertanian agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, pendampingan yang berikan oleh pemerintah melalui para penyuluh pertanian membawa dampak yang positif bagi para petani yang ada di Kota Tomohon.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon adalah sebagai belum selesainya peraturan walikota tentang cadangan beras pemerintah kota, selain itu juga ketersediaan lahan yang cukup menjadi masalah yang dihadapi, dimana alihfungsi lahan terus terjadi salah satunya akibat dari system irigasi yang kurang baik. Pola konsumsi dan budaya masyarakat yang membuang-buang makan menjadi faktor penghambat yang berpengaruh apabila tidak dapat diatasi, pengetahuan para pedagang akan pentingnya data yang mereka berikan pun masih belum ada, hal ini membuat kesulitan bagi Dinas Pangan Daerah memetakan ketersediaan beras yang ada di Kota Tomohon. Fasilitas yang dimiliki petani masih belum memadai untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan harapan, selain itu gudang penyimpanan khususnya untuk cadangan beras pemerintah kota belum tersedia.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan ketersediaan beras yang ada Di Kota Tomohon, dan bagaimana meningkatkan produksi beras yang ada di Kota Tomohon

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Walikota Kota Tomohon beserta jajaran pemerintah Kota Tomohon yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, Dosen Pembimbing, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arghniya, N. S. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Aridhayandi, M. R. (2019). *"Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Beras Berdasarkan Konsep Kedaulatan Pangan Di Indonesia."* Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 5(1), 49. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1103>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Azhari, D. H., & Hadiutomo, K. (2014). *"Analisis Keunggulan komparatif Beras Indonesia."* Analisis Kebijakan Pertanian, 11(1), 61–73.
- Dewi, G. P., & Ginting, A. M. (2012). *"Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan."* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, September 2011, 67–75.
- Dirhamsyah, T. (2016). *Ketahanan Pangan : Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Rawan Pangan di Jawa*. Plantaxia.
- Gunawan, C. I. (2017). *Pengaruh Luas Panen, Produktivitas, Konsumsi Beras, Dan Nilai Tukar Petani Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Brebes*.
- Kaputra, I. (2013). *"Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian, Dan Kedaulatan Pangan."* Jurnal Strukturasi, 1(1), 25–39.
- Kurniasari, M., & Ariastita, P. G. (2014). *"Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan."* Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 27–40. [papers3://publication/uuid/3E189B18-A9EB-434E-B76B-B0A90143D6FA](https://publication.uu.id/publication/uuid/3E189B18-A9EB-434E-B76B-B0A90143D6FA)
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Mardalis, A., & Rosyadi, I. (2015). Model revitalisasi fungsi dan peran lumbung pangan desa untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru I*. Rineka Cipta.
- Nugrohowati, R. H., & Prathama, A. (2022). *Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Padi*. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 193-199.
- Prabowo, R. (2010). *"Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia."* Mediagro, 62(2), 62–73.
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). *"Dampak Ahli Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan*

- Pangan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.*" Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(3), 195–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Rahma, Y., Khaerah, N., & Akbar, M. R. (2021). Peran Pemerintah dalam Inovasi Gerakan Serentak Pemanfaatan Pekarangan Organik (Gertak Petani) Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Lapajung Kabupaten Soppeng. *KYBERNOLOGY: Journal of Government Studies*, 1(1), 65-76.
- Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). *"Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan(Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)."* Governance, 1, 1–12.
- Sedana, I. D. G. P., & Permini, N. L. P. E. (2023). Urban Farming dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 181-188. Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (2nd ed.). ALFABETA.
- Sirait, D. E. S. (2023). Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Menjaga Ketersediaan Kebutuhan Pangan di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negara).
- Sonia, Nita, Etih Henriyani, and Erlan Suwarlan. *"Peran Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pangandaran."* (2022).
- Suarsana, K. (2020). Ketahanan pangan berbasis adat (tantangan penanganan covid-19 di bali). Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020.
- Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan. (2013). *"Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa."* Jurnal Agrisistem, 9(2), 169–179.
- Yanti, D. D., & Nawangsari, E. R. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Urban Farming.* Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 251-256.